



**Reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang:
Potensi Ancaman dalam Komitmen Jepang Pada *War on Terror***

Damartyas Murti Wredhanto

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

International Security issue has been a huge concern to Japan under the administration of Shinzo Abe. After the demilitarization of the Japan by the United States and the allies on World War II, Japan can only rely on the United States military base in Okinawa, and some other kind of police to protect themselves. Japan's intend to strengthen its military capacity and power was outlawed due to Article 9 of the Japanese 1947 Constitution that restricts Japan to use any form of military power to solve any kind of dispute that taken place on their territory. The Constitution was made by the United States and the allies as the victorious side of the World War II to disarm all of Japan's military capacity and power. With that constitution (especially Article 9), Japan was changing from an expansionist-imperialist into a peaceful country that uses any form of negotiation to solve any kind of dispute that they've faced. But on 2014, Prime Minister Shinzo Abe and his administration unveils that reinterpretation of the Article 9 is happening and being discussed at the parliament to allow Japan's Self Defense Force (JSDF) (for the first time) helps the allies if they needed some, to support War on Terror propaganda by the United States.

Keywords: *reinterpretations, defense, terrorism, potential threat*

Pendahuluan

Ketika kita berbicara mengenai keamanan secara tradisional, kita akan lebih mengacu kepada seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki oleh negara lain yang sewaktu-waktu dapat menyerang dan mengancam kedaulatan suatu negara. Hal ini didasari pada pandangan realisme yang menekankan keamanan pada kekuatan militer yang dimiliki suatu negara, di mana aktor yang berperan penting di dalam keamanan adalah negara. Hal ini disebabkan oleh Perang Dunia II yang membentuk opini keamanan tradisional bahwa ancaman berbentuk fisik atau dalam hal ini militer. Selain itu, *arms race* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin yang bersaing dalam bidang militer juga menjadi acuan kaum realis dengan menyimpulkan bahwa ancaman negara berasal dari luar negara. Oleh karena itu, secara tradisional, keamanan dapat diartikan sebagai segala bentuk perlindungan terhadap kedaulatan upaya untuk mengatasi suatu ancaman pada suatu zona wilayah teritorial negara yang bersifat militer.

Namun dalam perkembangannya, ketika kita berbicara mengenai keamanan, ada banyak hal yang dapat dikaitkan dengan isu ini. Aktor-aktor di dalam keamanan tidak lagi didominasi oleh negara, melainkan juga aktor-aktor non-negara. Sumber-sumber ancaman kepada negara tidak lagi hanya berasal faktor eksternal wilayah negara tersebut –yaitu negara lain-, melainkan juga bisa berasal dari dalam negara itu sendiri. Oleh karena itulah, konsep keamanan tradisional dianggap sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang ada saat ini. Kemudian, muncul suatu konsep keamanan yang

lain yaitu keamanan non-tradisional yang tidak hanya mengenai isu militer, namun juga isu-isu non-militer dan merubah ruang lingkupnya dengan beralih menjadi transnasional yaitu menggabungkan aspek domestik dan internasional yang dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan globalisasi (Chauduri, S).

Isu keamanan internasional juga menjadi perhatian pemerintah Jepang pada era Shinzo Abe. Setelah demiliterisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca PD II, Jepang hanya dapat menggantungkan pertahanan dan keamanannya pada militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Okinawa Air Force Base, Okinawa dan juga mereka hanya memiliki polisi yang hanya merupakan kekuatan kecil untuk menjaga keamanan. Kapasitas Jepang untuk membangun kekuatan militernya dikekang oleh Pasal 9 Konstitusi 1947 yang melarang Jepang untuk menggunakan kekuatan militernya dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Konstitusi tersebut dibuat oleh AS sebagai negara pemenang Perang Dunia II, untuk melucuti semua kapasitas militer Jepang. Dengan adanya konstitusi tersebut, negara Jepang yang tadinya bersifat ekspansionis-imperialis, beralih menjadi negara yang pasif yang selalu menekankan negosiasi dalam menyelesaikan setiap sengketa yang mereka hadapi.

Pada tahun 2014, Perdana Menteri Shinzo Abe mengungkapkan bahwa proses reinterpretasi konstitusi sedang berlangsung dan sedang dibahas dalam parlemen dengan mengangkat reinterpretasi Pasal 9 yang untuk pertama kali akan mengizinkan Jepang untuk mengerahkan militernya jika sekutu membutuhkan (Sasahara, 2015). Hal ini sempat menimbulkan keresahan dan perdebatan di dunia internasional. Mendengar berita ini, Amerika Serikat tidak terlalu terkejut karena sebenarnya mereka telah beberapa kali menginginkan partisipasi militer Jepang untuk membantu Amerika Serikat dalam perang sejak Perang Dingin serta dalam setiap usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menanggulangi terorisme (Richter, 2016). Namun, langkah ini dikecam oleh banyak pihak dan mereka mengkhawatirkan bahwa langkah untuk mengreinterpretasi konstitusi ini akan membangkitkan sifat Jepang yang agresif sama seperti pada waktu terjadinya Perang Dunia II lalu, dimana Jepang dapat dikatakan menguasai hampir seluruh Asia Timur yang kemudian mendapatkan bantuan dari Aliansi Axis yaitu Nazi-Jerman dibawah Adolf Hitler dan juga Italia dibawah Benito Mussolini dan menjadi musuh Amerika Serikat dan sekutu (Beasley, 2003). Pada pidatonya Shinzo Abe berusaha untuk menjelaskan kepada dunia bahwa mereka hanya akan mengubah interpretasi Pasal 9 menjadi Jepang akan menurunkan militernya jika sekutu dalam keadaan terancam (Friedman, 2016).

Niat Jepang untuk mereinterpretasi Pasal 9 Konstitusi ini sebenarnya telah muncul pada tahun 1990, dimana pada saat itu seiring dengan meletusnya Perang Teluk, Perdana Menteri Jepang Toshiki Kaifu mencoba untuk mereinterpretasi Pasal 9 ini. Inti dari keinginan PM Toshiki Kaifu adalah diperbolehkannya Japan Self Defense Force untuk berpartisipasi dalam operasi-operasi militer diluar wilayah Jepang namun tetap dibawah naungan PBB sebagai PKO. Amerika Serikat, sebagai negara hegemon saat ini, dapat menjaga stabilitas kawasan Asia Timur dengan berbagai langkah negosiasi kepada Jepang untuk memastikan bahwa Reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 ini benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menjaga pertahanan dan keamanan Jepang (Panton, 2009).

Pembahasan

Terorisme bukan merupakan hal baru yang dialami oleh masyarakat dunia, bahkan di Asia Tenggara. *War on terror*, atau sering disebut *worldwide war on terrorism* merupakan satu hal yang digagas oleh Pemerintah Amerika Serikat dibawah Presiden George W. Bush pasca terjadinya serangan terror ke WTC pada 11 September 2001. Beberapa waktu kemudian Presiden Bush mengatakan bahwa musuh yang sebenarnya

adalah jaringan radikal dan setiap pemerintahan yang mendukung aksi ini. Istilah jaringan radikal ini pertama kali ditujukan kepada al-Qaeda. Di Asia Tenggara, terorisme bukan merupakan hal yang baru. Peristiwa Bom Bali I menjadi salah satu titik balik dalam memerangi teroris dan menangkalkan aksi yang dilakukan oleh jaringan mereka. Jika pada masa lalu teroris selalu dikaitkan dengan al-Qaeda, saat ini setiap aksi teror dikaitkan kepada satu organisasi radikal besar yaitu *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) atau dikenal juga dengan *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL). ISIS seakan-akan berhasil memberikan satu ketakutan besar pada masyarakat dunia dengan berbagai fasilitas lengkap yang mereka miliki. Perencanaan, pendanaan, dan sistem organisasi yang terstruktur juga menjadi bukti bahwa ISIS merupakan salah satu musuh utama dunia dalam memerangi aksi terorisme untuk membubarkan organisasi radikal seperti ini.

Hal yang sangat menarik adalah adanya dinamika hubungan internasional yang kini diwarnai oleh terorisme. Setelah serangan teroris pada 11 September 2001 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa 9/11, Pemerintahan Bush mendeklarasikan apa yang disebut *war on terrorism* atau sering disebut WOT, yang melibatkan operasi militer yang terbuka dan bebas, usaha untuk memotong arus pendanaan terorisme dan juga pengiriman pasukan ke regional lain seperti yang kemudian ia lakukan di Iraq dan Afghanistan. Beberapa negara kemudian mengikuti dan mendukung langkah Amerika Serikat dalam memberantas terorisme bahkan ada beberapa negara yang ikut menerjunkan pasukannya untuk berpartisipasi dalam *war on terrorism* yang digagas AS ini. Namun dikemudian hari beberapa ahli mengkritik bahwa *war on terrorism* merupakan satu ideologi yang menekankan pada penyebaran rasa takut dan penekanan yang justru akan menambah musuh dan justru secara langsung menyetujui penggunaan kekerasan dibandingkan memetakan satu aksi teror secara lengkap dan meningkatkan keamanan suatu negara.

Jepang sebagai negara yang tergantung pada sistem keamanan dan pertahanan AS, merespon *war on terrorism* AS tersebut dengan memberikan dukungan finansial dan pasukan SDF-nya ke Afganistan dan Irak. Dukungan tersebut dilandasi oleh undang-undang anti-terorisme sebagai landasan hukum bagi Jepang untuk terlibat dalam misi perdamaian. Dukungan tersebut tak lepas dari adanya persepsi ancaman dari gerakan dan kelompok teroris terhadap wilayah kedaulatan dan integritas Jepang. Terlebih secara geopolitik, Jepang sangat rawan terhadap serangan teroris. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa perubahan-perubahan dalam bidang pertahanan terus terjadi di Jepang. Perubahan kebijakan yang penting yang kemudian menjadi titik balik bagi Jepang ada di tahun 2007 ketika Parlemen Jepang secara resmi mengubah Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan yang setara dengan satu kementerian tunggal.

Penggantian Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan dilakukan dalam rangka meningkatkan status pertahanan yang dimiliki Jepang sebelumnya. Dengan hal ini maka dalam segi pertahanan, Jepang akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar karena memiliki hak untuk menentukan dan merancang anggaran pertahanan sendiri dan juga dapat mengajukan rancangan undang-undang. Anggaran ini dapat dialokasikan dalam rangka peningkatan kekuatan militer seperti jumlah pasukan, penambahan armada kapal perang, dan penambahan atau peremajaan pesawat tempur. Tidak hanya itu Departemen Pertahanan juga memiliki hak penuh dalam menentukan kebijakan pertahanan. Peningkatan status Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan ini secara tidak langsung dapat dilihat adanya satu niat Jepang untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam menangkalkan ancaman keamanan di kawasan, terutama dari Korea Utara dan peningkatan kemampuan militer Tiongkok.

Tahun 2010 juga menjadi satu titik balik bagi Jepang untuk mereinterpretasi Pasal 9. Dipengaruhi oleh situasi keamanan regional seperti peningkatan militer Tiongkok dan ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara, perubahan kebijakan ini menjadi satu opsi

yang dapat dipilih dari faktor tersebut. Jepang meluncurkan suatu kebijakan pertahanan baru dalam bentuk *The National Defense Program Guidelines* (NDPG) pada bulan Desember 2010. NDPG yang dikeluarkan di tahun 2010 ini melengkapi NDPG yang sudah ada sebelumnya yang merupakan satu perubahan besar dari NDPG terdahulu pasca-Perang Dunia II yang menggantikan konsep pasifisme menjadi konsep pertahanan yang lebih dinamis dan lebih bebas yang menuntut Jepang untuk lebih proaktif dalam memainkan peranan internasionalnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Dengan kehadiran NDPG ini akan merangkul kebijakan pertahanan Jepang yang lebih aktif. Disamping itu sejalan dengan keaktifan pertahanan ini, NDPG baru menetapkan bahwa Jepang akan terus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pertahanan dengan cara bekerjasama dengan Amerika Serikat dan juga meningkatkan kemampuan militer Jepang sebagai satu opsi atau cara atas suatu keadaan kawasan yang dapat dikatakan mengancam Jepang. Saat ini pula, Jepang mengalihkan fokus pertahanan dari utara (Korea Utara dan Korea Selatan) ke barat daya dimana Jepang berbagi perbatasan maritim dengan Tiongkok. Hal ini semakin membuktikan bahwa keamanan regional menjadi salah satu hal yang dianggap sebagai ancaman tersendiri bagi Jepang hingga mereka mengubah kebijakan pertahanan dengan memperkuat militer mereka agar setara dengan negara di kawasan Asia Timur.

Pada 2013, Jepang mengeluarkan dua dokumen penting, yaitu Strategi Nasional Jepang yang pertama dan melakukan pembaharuan terhadap NDPGnya. Hal ini diakibatkan karena Jepang merasa terancam pada apa yang ada disekitarnya sehingga mereka membutuhkan satu pedoman baru yang dianggap mampu untuk setidaknya melindungi Jepang dalam melaksanakan tujuan nasionalnya. Kemudian atas dasar ini, munculah istilah *Proactive Contribution to Peace*. Tentu saja, Jepang tidak dapat berjalan sendirian untuk dapat menciptakan stabilitas kawasan dan stabilitas dunia. Dibawah NDPG yang baru, Jepang berencana untuk memperkuat daya gempur dan meningkatkan pertahanannya dalam baik segi jumlah dan kualitas dalam alutsista yang dimiliki di *Japan Air Self-Defense Force* (JASDF), *Japan Ground Self-Defense Force* (JGSDF), dan juga *Japan Maritime Self-Defense Force* (JMSDF).

Potensi Ancaman: Perkembangan Tiongkok Sebagai Negara Hegemon Baru di Asia Timur

Perkembangan yang dialami oleh Tiongkok saat ini dapat dikatakan sama dengan di Amerika Serikat atau bahkan dalam waktu yang akan datang dapat melampaui Amerika Serikat dengan program *silk belts and roads*¹ yang mereka gagas untuk menghubungkan arus perdagangan antara Asia dan Eropa. Sejak 1949, menurut World Bank, Tiongkok berhasil mengeluarkan 800 juta orang dari kemiskinan sejak adanya reformasi ekonomi pada 1978. Pada 2015 Tiongkok berhasil untuk meraih seluruh Rencana Pembangunan Millenium PBB dan mereka memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi dunia sejak krisis finansial 2008. Tidak lupa juga Tiongkok juga telah melatih jutaan orang untuk menulis dan membaca, serta membangun infrastruktur moden seperti jalan dan kereta cepat. Peningkatan militer juga tentunya mengikuti peningkatan ekonomi Tiongkok.

Menurut Global Firepower², pada 2018 ini Tiongkok memiliki jumlah tentara sebanyak 2.693.000 personel dimana 2.183.000 merupakan tentara aktif dan 510.000 merupakan tentara cadangan. Sementara itu terdapat 750.000.000 orang yang bisa

¹ Belt and Road Initiatives adalah satu terobosan yang dikeluarkan oleh Tiongkok untuk memperlancar arus barang antara 71 negara yang menguasai hampir setengah populasi dunia dan seperempat dari GDP Dunia. Hal ini dilakukan karena adanya perlambatan perkembangan ekonomi yang dialami Tiongkok beberapa waktu ini.

² Global Firepower merupakan suatu laman yang menyediakan semua rincian data militer secara detail dengan data yang cukup akurat pada hampir semua negara di dunia.

dipersiapkan untuk menjadi tentara jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dalam sisi pertahanan darat Tiongkok memiliki kendaraan tempur sejumlah 9.000 orang, tank sejumlah 7.716, dan 10.296 artileri. Dari sisi pertahanan laut, Tiongkok memiliki Kapal perang berjumlah 714 kapal yang terdiri dari 1 kapal induk bernama Liaoning, 50 kapal kelas *frigates*, 29 kapal kelas perusak (*destroyer*), 39 kapal kelas *corvettes*, 73 kapal selam, 220 kapal patroli, dan juga 29 kapal penyapu ranjau. Untuk pertahanan udara Tiongkok mempunyai jumlah pesawat 3.035 unit yang terdiri dari 1.125 pesawat *fighter*, 1.527 pesawat serang, 722 pesawat angkut, 353 pesawat latih, 985 helikopter yang 281 diantaranya merupakan helikopter tempur. Dalam segi anggaran pertahanan Tiongkok mengalokasikan \$151.000.000.000 untuk pertahanannya.

Angka diatas jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Jepang. Anggaran pertahanan Jepang hanya \$44.000.000.000, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Tiongkok. Dalam segi pertahanannya, di darat, Jepang memiliki total 310.457 tentara yang terdiri dari 247.157 tentara aktif, dan 63.300 personel cadangan. Terdapat 54.000.000 orang yang dapat dipersiapkan untuk bertempur. Dalam pertahanan darat, Jepang memiliki tank dengan jumlah 679 unit, 3.178 kendaraan tempur, dan 801 artileri. Dari sisi pertahanan laut, Tiongkok memiliki Kapal perang berjumlah 131 kapal yang terdiri dari 4 kapal induk, 36 kapal kelas *destroyer*, 6 *corvettes*, 17 kapal selam, 6 kapal patroli, dan juga 25 kapal penyapu ranjau. Untuk pertahanan udara Tiongkok mempunyai jumlah pesawat 1.508 unit yang terdiri dari 290 pesawat *fighter*, 290 pesawat serang, 486 pesawat angkut, 404 pesawat latih, 622 helikopter dimana 84 diantaranya merupakan helikopter tempur.

Selain itu baru-baru ini juga Tiongkok tengah membangun kapal induk keduanya dan telah memiliki kapal induk pertama lengkap dengan pesawatnya yang merupakan Kuznetsov class bekas Uni Soviet, yang diperbaharui, diremajakan dan dinamakan Liaoning. Tidak lupa bahwa Tiongkok telah berhasil membuat pesawat silumannya sendiri yaitu Chengdu J-20 yang diklaim memiliki kemampuan seperti pesawat generasi ke-5 buatan Amerika Serikat, F-22 Raptor Saat ini, Tiongkok sedang melakukan percobaan untuk pesawat yang dikhususkan untuk *electronic warfare*³ –untuk menyaingi Boeing/Lockheed-Martin EA-18G Growler buatan AS- yaitu Shenyang J-16D yang berbasis Shenyang J-11BS yang merupakan produk lisensi buatan Tiongkok yang dibuat dan dikembangkan dari pesawat tempur milik Rusia, Sukhoi Su-30MKK.

Potensi Ancaman: Serangkaian Aksi Terorisme di Jepang dan Kawasan Asia

Pada 20 Maret 1995, Jepang mengalami serangan teroris terburuk dalam sejarahnya ketika sekelompok eksrimis religius menyerang sistem transportasi kereta bawah tanah Tokyo. Grup ini bernama Aum Shinrikyo⁴, yang kemudian melancarkan lima serangan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan menggunakan gas sarin yang melukai sejumlah pengguna kereta bawah tanah dan menewaskan 12 orang. Pada awal dekade 2000-an, terdapat kelompok Aum Shinrikyo yang merupakan salah satu kelompok radikal yang sering meresahkan warga Jepang sendiri karena berbagai teror yang mereka lakukan seperti penculikan, pembunuhan, dan berbagai serangan lain. Aum Shinrikyo, yang memiliki arti kebenaran tertinggi, pertama kali didirikan oleh Shoko Asahara -yang

³ *Electronic warfare* atau peperangan elektronik adalah sebuah konsep peperangan modern yang menggunakan sistem intervensi elektronik berbentuk gelombang elektromagnetik terhadap sistem yang dimiliki lawan. Hal-hal yang dapat diintervensi antara lain saluran komunikasi, infra merah, dan hingga radar. Cara kerja dari EW adalah dengan melakukan jamming pada sistem yang dimiliki lawan sehingga membuat kacau sistem elektronik dari peralatan yang dimiliki oleh lawan.

⁴ Aum Shinrikyo adalah salah satu aliran sesat yang menggabungkan berbagai ajaran agama yang didirikan oleh Shoko Asahara pada 1984. Mereka mengklaim bahwa mereka merupakan agama bagi kaum elit.

kemudian dieksekusi mati pada pertengahan 2018- menggabungkan aliran Hindu dan Buddha dan juga ajaran Kristen. Asahara mengklaim bahwa ia mampu menghapus dosa manusia dan menahbiskan dirinya sebagai seorang nabi. Banyak dari pengikut aliran ini adalah orang-orang yang merasa tertekan dengan hidupnya dan aliran ini menjanjikan kehidupan yang lebih berarti. Bahkan mereka juga bekerjasama dengan Yakuza. Kelompok ini juga melakukan ekspansi dan merekrut orang yang berasal dari luar Jepang, seperti Montenegro, Jerman, Australia, Taiwan, Sri Lanka Belarus, Rusia, Ukraina, dan Uzbekistan.

Pada 2004, kelompok ini melakukan serangkaian teror dengan menyebarkan gas sarin⁵ ke pemukiman penduduk dan membunuh tujuh orang. Kemudian pada Januari 1995 kelompok ini melepaskan gas sarin di Kota Matsumoto. Serangan teror yang terparah adalah ketika mereka menyerang sistem kereta bawah tanah Tokyo hingga menyebabkan 13 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka dalam lima serangan yang mereka lakukan pada tiga jalur kereta (Marunouchi, Chiyoda, dan Hibiya) yang memiliki jutaan pengguna pada jam padat dengan melepaskan gas sarin didalam kereta. Setelah serangan ini polisi melakukan penangkapan ke properti yang dimiliki kelompok ini dan kemudian menangkap Asahara dan memvonis Asahara hukuman mati pada tahun 2006. Saat ini masih terdapat ribuan anggota kelompok ini namun polisi masih mengawasi pergerakan mereka secara waspada. Mereka melakukan kegiatannya jauh dari pengawasan publik dan bahkan mereka memiliki kelompok kecil yang bernama *Hikari no Wa* yang didirikan oleh juru bicara Asahara yaitu Fumihiro Joyu.

Munculnya ISIS juga menjadi pendorong bagi Jepang untuk mereinterpretasi Pasal 9 untuk membantu sekutu dalam pemberantasan terorisme diluar teritorial Jepang. Pada Agustus 2014, Haruna Yukawa, seorang yang merupakan jurnalis sekaligus dokter diculik dan ditawan di pinggiran Kota Aleppo. Pada Oktober 2014, Kenji Goto, seorang jurnalis lepas, diculik di Raqqa. Kemudian pada 20 Januari 2015, ISIS merilis video ancaman untuk mengeksekusi dua warga negara Jepang yang menjadi tahanan mereka yaitu Haruna Yakawa dan Kenji Goto. Permintaan ISIS adalah \$100 juta untuk masing-masing orang. Aksi ini adalah reaksi mereka atas kebijakan Jepang yang berkomitmen untuk menyumbang \$200 juta dalam bentuk bantuan non-militer pada negara-negara yang melawan ISIS. Karena batas waktu atas permintaannya sudah terlewati, ISIS kemudian mengeksekusi kedua orang ini. Hal ini menimbulkan kecaman dan kemarahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang tetap kukuh dan berjanji untuk melawan terorisme tanpa rasa ampun.

Sayap-sayap ISIS di Jepang dan Munculnya Afiliasi ISIS di Asia Tenggara

Dr. Hassan Ko Nakata dan Saifullah Ozaki merupakan dua orang yang dianggap memiliki kaitan dengan ISIS yang merupakan warga Jepang dan warga keturunan Jepang. Dr. Ko Nakata merupakan seorang warga negara Jepang yang meraih gelar Islamic Studies di Universitas Tokyo dan meneruskan studi doktoral dengan mengambil Filosofi Islam di Universitas Kairo. Ia kemudian bergabung ke Fakultas Teologi di Universitas Doshisha. Ia mengaku tertarik untuk mendalami studi tentang Islam pasca-Revolusi Iran⁶. Pada Tahun

⁵ Gas sarin pertama kali dikembangkan oleh Nazi pada Perang Dunia II walau kemudian tidak digunakan dalam perang ini. Sarin berasal dari nama ilmuwan yang berhasil menemukan gas ini yaitu Gerhard Schrader, Ottos Ambors, Gerhard Ritter, dan Hans-Jürgen von der Linde. Gas ini merupakan salah satu gas yang cukup berbahaya jika dihirup oleh manusia. Jika terhirup manusia, dalam hitungan kurang dari satu menit, gas ini akan menyebabkan sesak nafas dan kemudian menyerang sistem syaraf manusia yang dapat berujung dengan kematian.

⁶ Revolusi Iran merupakan suatu revolusi yang terjadi pada 7 Januari 1978 hingga 11 Februari 1979 yang berusaha untuk menjatuhkan sistem kerajaan di Iran dibawah Mohammad Reza Shah Pahlevi dan kemudian

2015, ia diduga terlibat dalam penangkapan dua warga negara Jepang yang berencana untuk pergi dan bergabung dengan ISIS di Suriah dan Iraq. Ia dianggap memberikan arahan kepada kedua warga Jepang itu untuk bergabung ke ISIS. Namun ia menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa ia tidak lagi mendukung ISIS setelah ia pergi ke Suriah dan gagal untuk melakukan negosiasi pelepasan Haruna Yukawa yang disandera oleh ISIS. Ketika ia kembali ke Jepang, ia mengatakan bahwa ia adalah penengah antara Kementerian Luar Negeri Jepang dan Umar Ghuraba, kelompok ISIS yang berbasis di Suriah Utara

Sementara itu Saifullah Ozaki merupakan warga keturunan Jepang yang lahir di Bangladesh dan merupakan warga negara Bangladesh. Ia menempuh studi di Universitas Ritsumeikan di Prefektur Kyoto dan menempuh studi doktoral pada Studi Asia-Pasifik tahun 2011 di tahun yang sama. Pada 2016, ia dan 10 orang lainnya dianggap terlibat pada serangan Teror di Dhaka pada Juli 2016⁷. Sewaktu masih tinggal di Jepang, polisi Jepang melakukan pemeriksaan terhadapnya dan memberikan kesimpulan bahwa ia sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok ekstrimis manapun.

Hadirnya kelompok Abu Sayyaf dan Maute di Filipina membuat kekhawatiran baru bagi sebagian besar Negara-negara di Asia termasuk Jepang, Indonesia, dan Malaysia. Abu Sayyaf merupakan suatu gerakan yang bersifat radikal yang mengikuti doktrin Wahhabi. Kelompok ini selalu menggunakan kekerasan disetiap aksinya seperti penculikan untuk mendapatkan uang tebusan, berbagai aksi pemboman, dan penyiksaan telah dilakukan oleh kelompok ini. Keberadaan kelompok ini membuat resah warga yang tinggal di Pulau Jolo dan Basilian di Filipina Selatan. Sedangkan Maute adalah suatu kelompok Islam radikal yang merupakan mantan pejuang Moro National Liberation Front (MNLF) -yang menginginkan kemerdekaan Filipina Selatan dan mendirikan Negara Filipina Selatan berdasarkan Syariat Islam- dan pejuang-pejuang asing yang direkrut dan dipimpin oleh Abdullah Maute, yang merupakan pendiri Dawlah Islamiya atau terafiliasi ISIS yang mendiami Lanao del Sur, Mindanao, Filipina. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan organisasi yang melepaskan diri dari MILF karena tidak setuju dengan visi MNLF yang pada akhirnya mau bekerja sama dengan pemerintah pasca munculnya *Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)*⁸.

Saat ini, MNLF sendiri membantu pemerintah dalam melawan Maute, Abu Sayyaf, dan *Bangsamoro Islamic Freedom Fighters*. Salah satu yang menjadi kekhawatiran kawasan adalah adanya *Battle of Marawi*⁹ di Marawi, Lanao de Sur, Filipina. Menurut Pemerintah Filipina, konflik ini dimulai ketika angkatan bersenjata berusaha menangkap Isnilon Hapilon -pemimpin Abu Sayyaf- setelah menerima informasi bahwa ia berada di kota ini untuk bertemu Kelompok Maute. Konflik bersenjata dimulai ketika para anak buah Hapilon melakukan tembakan ke angkatan bersenjata Filipina yang kemudian

mengganti sistem pemerintahan Iran dengan sistem Republik Islam dibawah Ayatollah Ruhollah Khomeini yang merupakan pemimpin revolusi.

⁷ Serangan Teror di Dhaka terjadi pada 1 Juli 2016. Pelaku memasuki Holey Artisan Bakery dengan membawa bom, pistol, dan juga menangkap belasan orang sebagai tawanan. 29 orang tewas termasuk 20 tawanan, 2 polisi, 5 pelaku, dan 2 pegawai dari Holey Artisan Bakery. ISIS mengklaim bahwa mereka melakukan hal ini, namun kemudian dikonfirmasi bahwa pelaku bukan merupakan anggota ISIS namun Jamaat-ul-Mujahideen.

⁸ Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) merupakan sebuah kebijakan otonomi khusus yang diberikan Pemerintah Filipina dimana masyarakat Muslim dapat membentuk hukumnya sendiri di wilayah ini.

⁹ Battle of Marawi merupakan konflik bersenjata ini terjadi selama lima bulan di Marawi, yang dimulai 23 Mei 2017, antara angkatan bersenjata Filipina dibantu MNLF melawan militan yang terafiliasi Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), termasuk kelompok Maute dan Abu Sayyaf. Konflik ini secara resmi baru berakhir setelah kematian Omar Maute dan Isnilon Hapilon

menyerang Camp Ranao dan menempati beberapa bangunan di kota itu termasuk Universitas Negeri Mindanao, sebuah rumah sakit, dan Balaikota Marawi.

Kesimpulan

Pasca Perang Dunia II, Jepang selalu mengedepankan negosiasi dalam penyelesaian konflik dan juga penyelesaian sengketa, mereka tidak dapat bertindak lebih dari itu karena langkah mereka dibatasi dengan adanya aturan *the peace clause* dalam Pasal 9 Konstitusi 1947. Kemudian pasca munculnya berbagai rangkaian aksi terorisme di dunia, muncul ide reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 ini. Hal yang utama pada usaha reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 adalah pada komitmen Jepang untuk memberantas terorisme dan pada perubahan orientasi terorisme di era modern ini. Reinterpretasi Pasal 9 ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari komitmen Jepang untuk mendukung propaganda *war on terror* yang dilakukan Amerika Serikat sejak era Presiden George W. Bush untuk membalaskan dendam pada berbagai rangkaian teror yang dilakukan oleh al-Qaeda terutama setelah peristiwa 9/11 yang benar-benar membuat Amerika Serikat terpukul dan membuat orientasi dunia pada terorisme berubah. Kekhawatiran Jepang terhadap ekspansi militer yang dilakukan oleh China dan ekspansi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tentu saja menjadi salah satu faktor pendorong mengapa Jepang memiliki niat untuk mereinterpretasi Pasal 9.

Referensi